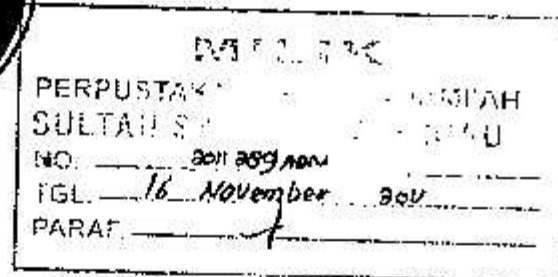


# **SKRIPSI**

**PERANAN BADAN PENGENDALIAN DAMPAK  
LINGKUNGAN DAERAH ( BAPEDALDA ) KABUPATEN  
ROKAN HILIR DALAM PENERTIBAN PENANGKARAN  
BURUNG WALET  
(STUDI DI KECAMATAN BANGKO)**



**OLEH:**

**MUHAMMAD DARBI**  
**NIM.10775000052**

**PROGRAM S1**

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
PEKANBARU**

**RIAU**

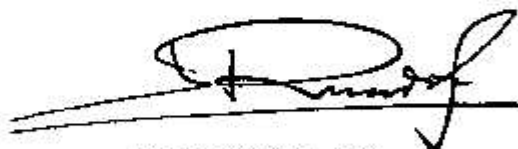
**2011**

**LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

NAMA : MUHAMMAD DARBI  
NIM : 10775000052  
JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
JUDUL : PERANAN BADAN PENGENDALIAN DAMPAK  
LINGKUNGAN DAERAH ( BAPEDALDA ) KABUPATEN  
ROKAN HILIR DALAM PENERTIBAN PENANGKARAN  
BURUNG WALET ( STUDI DI KECAMATAN BANGKO)

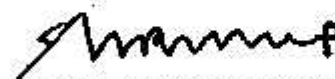
**DISETUJUI OLEH**

PEMBIMBING I



**RUSDI, S.Sos, MA**  
NIP. 19720906200710 1 002

PEMBIMBING II



**Drs. ALMASRI, M.Si**  
NIP. 19670801 200501 1 007

**MENGETAHUI**

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial



**Dr. MAHENDRA ROMUS, SP.M.Ec**  
Nip. 19711119 200501 1 004

Ketua Jurusan  
Ilmu Sosial Administrasi Negara




**Drs. ALMASRI, M.Si**  
Nip. 19670801200501 1 007

**LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI**

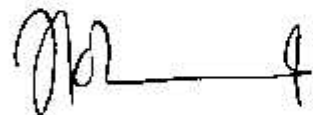
NAMA : MUHAMMAD DARBI  
NIM : 10775000052  
JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
JUDUL : PERANAN BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH ( BAPEDALDA ) KABUPATEN ROKAN HILIR DALAM PENERTIBAN PENANGKARAN BURUNG WALET ( STUDI DI KECAMATAN BANGKO)  
HARI/ TGL : SELASA/ 18 OKTOBER 2011

**PANITIA PENGUJI**

KETUA


  
**Drs. H. ZAMEHARIL YAHYA, MM**  
NIP. 19520615198103 1 003

SEKRETARIS

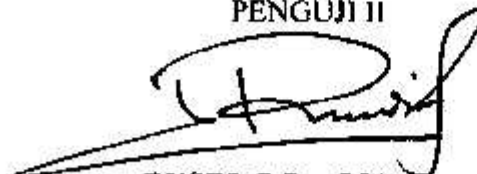
  
**IKHWANI RATNA, SE, MSI**  
NIP. 19830827 2011 01 2014

**ANGGOTA**

PENGUJI I

  
**Drs. ALMASRI, M.Si**  
Nip. 19670801200501 1 007

PENGUJI II

  
**RUSDI, S.Sos, MA**  
NIP. 19720906200710 1 002

## **ABSTRAK**

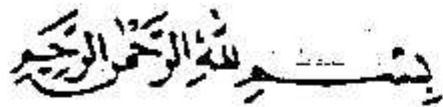
### **PERANAN BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH ( BAPEDALDA ) KABUPATEN ROKAN HILIR DALAM PENERTIBAN PENANGKARAN BURUNG WALET ( STUDI DI KECAMATAN BANGKO )**

**Oleh : MUHAMMAD DARBI**

**NIM : 1077500052**

*Penelitian ini dilakukan pada Kantor Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Rokan Hilir di Kecamatan Bangko dan kegiatan ini dilakukan pada Bulan Juni Tahun 2011. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penertiban penangkaran burung walet pada kecamatan bangko Kabupaten Rokan Hilir, dengan indikator pemantauan terhadap bunyi pita kaset burung walet, kegiatan pengusaha dalam penertiban penangkaran burung walet, melakukan tindakan persuasif pengusaha dilapangan, dan pelaporan pengusaha walet. Dengan data yang diambil data primer dan data skunder. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif yaitu data yang terkumpul dianalisis dengan menguraikan serta mengaitkan dengan teori-teori sesuai dengan permasalahan yang ada, kemudian diimpresasikan terhadap hasil yang relevan dan diambil kesimpulan dan diberikan saran. Hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini yaitu : diduga Peranan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah dalam menertibkan penangkaran burung walet belum berjalan dengan baik disebabkan kualitas kerja tim pemantau belum berjalan secara optimal. Dari analisis data diperoleh hasil sebagai berikut : (1) terhadap larangan membunyikan suara pita kaset burung walet kecuali pada pukul 16.00 s/d 19.00 wib dan batasan terhadap membunyikan suara pita kaset melebihi 55 desibel (db) masih banyak dilanggar oleh para pengusaha walet. (2) masih banyak pengusaha yang melakukan penangkaran burung walet disekitar tempat perkotaan, pendidikan, perumahan penduduk, tempat ibadah dan tempat pelayanan kesehatan masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan penertiban penangkaran burung walet di Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Bangko belum berjalan dengan optimal.*

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Dengan penuh rasa syukur serta tunduk dengan penuh keikhlasan penulis lafazkan dari hati yang paling dalam kepada Allah SWT yang terus memberikan kepada kita kesempatan dan peluang untuk dapat mengecap indahnya pendidikan di dunia ini sebagai bekal kita di akhirat nanti. Semoga dengan rahmat dan hidayah-Nya kita masih tetap mampu bersyukur serta mampu menjalani tugas kita sebagai manusia di dunia ini. Dengan segala kekuasaan dan hidayah yang telah diherikan oleh Allah SWT serta berkat rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan begitu banyak cobaan yang membuat penulis sadar akan kekuasaan Allah SWT, dengan perjalanan yang begitu panjang akhirnya sampailah pada suatu titik awal yang mana penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul ***"Peranan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah ( Bapedalda ) Kabupaten Rokan Hilir Dalam Penertiban Penangkaran Burung Walet (Studi Di Kecamatan Bangko) "*** semoga apa yang diharapkan dalam skripsi ini dapat terealisasi dengan baik dan benar.

Shalawat serta salam tidak lupa kita lafazkan kepada kekasih Allah yaitu Nabi Muhammad SAW, beliau merupakan salah satu tokoh dunia yang sangat disegani oleh sahabat maupun musuh-musuhnya. Beliau juga merupakan figur

yang wajib dicontoh bagi pemimpin-pemimpin muda serta kaum intelektual muslim. kerendahan hati, serta semangatnya dalam bekerja merupakan cerminan etos kerja yang sangat baik bagi generasi muda bagi bangsa yang sedang mengalami keterpurukan mental pada saat ini.

Tidak terasa hampir empat tahun sudah penulis melaksanakan pendidikan di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Suska Riau ini, kenangan demi kenangan sudah penulis lewati dengan beraneka ragam ujian dan cobaan, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih serta penghargaan yang begitu mendalam kepada semua makhluk ciptaan Allah yang senantiasa mendampingi penulis dalam keadaan suka maupun duka, ucapan terimakasih serta penghargaan yang mendalam penulis peruntukan yang pertama kepada:

1. Ayahanda tercinta **Sardani** dan Ibunda tercinta **Aminah**, yang selalu memberikan kasih sayang, cinta, perhatian, serta Do'a dan restu yang tak henti-hentinya engkau panjatkan di setiap langkahku dan dorongan baik moril maupun materil hingga terselesainya skripsi ini ( kata-kata tidaklah cukup untuk mewakili terima kasihku ayahanda dan ibunda ).
2. Bapak Prof. **Dr. H.M Nazir Karim** selaku Rektor UIN SUSKA
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Bapak **Dr. Mahendra Romus**, SP. M, Ec. Beserta PDI, PDII dan PDIII dan staf yang telah membantu.
4. Bapak Drs. Almasri, M.Si selaku Ketua Jurusan yang Administrasi Negara
5. Bapak Rusdi, S.sos, M.A selaku pembimbing I yang penuh dengan keikhlasannya mengantarkan penulis untuk dapat menyiapkan skripsi ini, dan

Bapak Drs. Almasri, M.Si selaku pembimbing II yang dengan semangatnya memberikan motivasi kepada Ananda. Bapak serta Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, serta dosen-dosen lain yang tidak mungkin disebutkan satu-persatu yang telah membantu dalam setiap waktu dan membimbing saya serta membagikan pengalaman dan ilmu yang sangat berharga kepada saya.

6. Bapak Kepala Bapedalda, Ibu Kasubag Umum dan Kepegawaian Bapedalda, Para Kabid. Kepala Bidang Lingkungan, penataan, amdal dan seluruh kasi-kasi Bapedalda dan seluruh pegawai beserta staf Bapedalda Kabupaten Rokan Hilir yang sudah dengan ikhlasnya memberikan informasi kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Buat Ibuku ( Yusma, SE ) yang telah banyak memberi motivasi dan berkorban untukku terima kasihku ucapkan atas semua apa yang telah ibu berikan kepadaku aku bangga punya ibu seperti mu yang selalu ingin memajukan keluarga kita
8. Dan tidak lupa Buat Abang dan Kakakku Ulong ( Alm. Sarmidi ), Alang Safrizal, Udo Cikro, Unah Safrudin, Ulong Subroto, S.kom dan Adekku Suandri, Dewi, Satriani, Jaka, Adel dan Keponakan-keponakanku Serta seluruh keluarga besarku yang telah turut mendo'akan dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabatku Guntur Alamsyah, S.sos yang telah banyak membantuku dalam mengarahkan penyusunan skripsi ini, Bang Amir

Bapak Drs. Almasri, M.Si selaku pembimbing II yang dengan semangatnya memberikan motivasi kepada Ananda. Bapak serta Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, serta dosen-dosen lain yang tidak mungkin disebutkan satu-persatu yang telah membantu dalam setiap waktu dan membimbing saya serta membagikan pengalaman dan ilmu yang sangat berharga kepada saya.

6. Bapak Kepala Bapedalda, Ibu Kasubag Umum dan Kepegawaian Bapedalda, Para Kabid. Kepala Bidang Lingkungan, penataan, amdal dan seluruh kasi-kasi Bapedalda dan seluruh pegawai beserta staf Bapedalda Kabupaten Rokan Hilir yang sudah dengan ikhlasnya memberikan informasi kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Buat Ibuku ( Yusma, SE ) yang telah banyak memberi motivasi dan berkorban untukku terima kasihku ucapkan atas semua apa yang telah ibu berikan kepadaku aku bangga punya ibu seperti mu yang selalu ingin memajukan keluarga kita
8. Dan tidak lupa Buat Abang dan Kakakku Ulong ( Alm. Sarmidi ), Alang Safrizal, Udo Cikro, Unah Safrudin, Ulong Subroto, S.kom dan Adekku Suandri, Dewi, Satriani, Jaka, Adel dan Keponakan-keponakanku Serta seluruh keluarga besarku yang telah turut mendo'akan dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabatku Guntur Alamsyah, S.sos yang telah banyak membantuku dalam mengarahkan penyusunan skripsi ini, Bang Amir



Hamzah yang telah memberikan doa dan dukungan yang sangat besar kepada penulis.

10. Buat yang Special Adinda Ranti Purnama Sari, SE yang turut memberikan dukungan semangat dan motivasi demi kelancaran penyelesaian skripsi ini.
11. Alfan Alkautsar S.sos, Bambang Sugito S.sos, Salman, dan juga banyak lagi teman-teman angkatan '07 yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, perhatian, serta canda tawa selama penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan, karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita kejalan yang penuh kebaikan dan kebenaran.

Amin...

*Billahi Taufiq wal Hidayah Wassalamu'alaikum Wr,Wb*

Pekanbaru, 05 Oktober 2011

Penulis

**MUHAMMAD DARBI**  
**NIM.10775000052**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>x</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	16
1.3. Tujuan Penelitian .....	16
1.4. Manfaat Penelitian .....	16
1.5. Sistematika Penulisan .....	17
 <b>BAB II TELAAH PUSTAKA</b>	
2.1. Kebijakan Publik .....	19
2.2. Otonomi Daerah .....	24
2.3. Pajak .....	29
2.4. Pemrintahan Daerah .....	30
2.5. Pengertian Peranan .....	37
2.6. Peran Kelembagaan .....	38
2.7. Pengertian Lingkungan .....	39
2.8. Konsep Operasional .....	40
2.9. Hipotesis .....	42
2.10. Variabel Penelitian .....	42
 <b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
3.1. Lokasi Penelitian .....	44
3.2. Jenis dan Sumber Data .....	44
3.3. Teknik Pengumpulan Data .....	45
3.4. Populasi dan Sampel .....	46
3.5. Analisis Data .....	47
 <b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
4.1. Keadaan Geografis Kabupaten Rokan Hilir .....	48
4.2. Bapedalda Kabupaten Rokan Hilir .....	52
 <b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
5.1. Peranan Bapedalda Terhadap Pelaksanaan Penertiban Sarang Burung Walet .....	63
 <b>BAB VI PENUTUP</b>	
6.1. Kesimpulan .....	87

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur dengan melalui peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional, maka pelaksanaan harus merata diseluruh tanah air dan ini tidak terlepas dari pembangunan daerah yang merupakan bagian yang sangat penting dari pembangunan nasional.

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah dengan esensi kebijakan otonomi daerah yang bergulir dewasa ini telah menempatkan Kabupaten dan Kota sebagai titik berat otonomi nampaknya akan memberi harapan yang lebih terlaksana bagi daerah untuk dapat mengembangkan diri. Otonomi juga memberi harapan bagi masyarakat untuk dapat menikmati pelayanan publik yang lebih terlaksana dan terciptanya iklim demokrasi di daerah serta memunculkan harapan baru bagi masyarakat untuk memperoleh kebijakan- kebijakan daerah yang lebih mementingkan nasib mereka daripada hanya sekedar mengakomodasikan keinginan pemerintah pusat sebagaimana yang telah terjadi dimasa yang lalu. Otonomi daerah dengan berbagai harapanyang terdapat didalamnya bukan lagi hanya merupakan suatu retorika belaka.

Namun telah menjadi realita yang harus ditangani dengan semangat untuk semakin memajukan kehidupan masing-masing daerah dalam suatu ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan otonomi daerah dengan harapan yang ada di dalamnya harus senantiasa disikapi dengan kerja keras agar semua harapan yang diinginkan oleh kebijakan otonomi daerah dapat segera terwujud.

Secara sederhana tujuan penyelenggaraan pemerintah di daerah dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Secara politis untuk menjaga tetap berdirinya dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang dikonstruksikan dalam sistem pemerintahan pusat dan daerah, yang memberi peluang turut sertanya rakyat dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- b. Secara formal dan konstitusional untuk melaksanakan ketentuan dan amanat UUD 1945
- c. Secara operasional untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan dan kestabilan politik dan kesatuan bangsa.
- d. Secara administrasi pemerintahan, untuk lebih memperlancar dan menertibkan pelaksanaan tata pemerintahan, sehingga dapat terlaksana secara efisien dan produktif. (Supriatna, 1993 : 87)

Dampak positif dari reformasi total ini, ditinjau dari segi politik dan ketatanegaraan telah terjadi pergeseran paradigma dari system pemerintahan yang bercorak sentralistik dengan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam wujud otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, sesuai kondisi potensi wilayahnya.

Salah satu aspek dalam keleluasaan kepada daerah yang merupakan suatu hal yang signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri antara lain adalah kewenangan untuk membuat peraturan daerah (Perda). Salah satu daerah yang menikmati hasil dari otonomi pemerintahan daerah ini adalah Kabupaten Rokan Hilir. Daerah yang diatur pembentukannya dalam Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 yang mengatur pembentukan kabupaten Rokan Hilir yang diharapkan pembangunan yang selama ini dirasakan oleh masyarakat setempat masih kurang untuk dapat ditingkatkan.

Dalam memberikan pelayanan dan pelaksanaan pemerintahan daerah pada saat otonomi daerah saat ini, Kabupaten Rokan Hilir telah melaksanakan beberapa usaha yang dapat menyelesaikan permasalahan kepentingan rakyat salah satunya adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah disingkat dengan BAPEDALDA yang berfungsi untuk Pelaksanaan Pelestarian dan Pemulihan Kualitas Lingkungan yang mempunyai tugas pokok untuk membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan pengendalian dampak lingkungan di daerah, Bapedalda Kabupaten Rokan Hilir merupakan Badan atau Instansi pemerintah yang mengurus masalah tentang perizinan salah satunya perizinan usaha walet

yang mempunyai kewenangan penuh terhadap pemberian izin kepada pengusaha walet, yang ada di Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Peraturan Bupati No 09 Tahun 2007 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet pada Pasal 6 menjelaskan bahwa :

1. Kewenangan pemberian izin berada pada Bupati
2. Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah atas nama Bupati menerbitkan dan menandatangani izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet

Bapcdalda juga berperan untuk menjalankan Peraturan Bupati diantaranya adalah peraturan yang dibuat dalam pelaksanaan pengusahaan burung walet yang dituangkan dalam Peraturan Bupati No. 09 tahun 2007 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dengan tujuan:

- a. Burung walet merupakan salah satu satwa liar yang dapat dimanfaatkan secara lestari untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
- b. Untuk menjaga keamanan, ketertiban umum, meningkatkan keindahan dan kenyamanan kota serta kesehatan lingkungan masyarakat.
- c. Dalam rangka pemasukan uang kas bagi daerah.

Sampai saat ini Kabupaten Rokan Hilir memiliki 6 kecamatan yang memiliki daerah penghasil burung walet yaitu kecamatan Bangko, Kecamatan Bangko Pusako, Kecamatan Rimbo Melintang, Kecamatan Sinoboy, Kecamatan Kubu dan Kecamatan Bagan Sinembah.

Salah satu kecamatan yang memiliki pengusaha burung walet lebih besar adalah Kecamatan Bangko. Dan dalam pelaksanaan pengusahaan burung walet ini

memiliki satu permasalahan yang aktual adalah bahwa dapat dilihat masih ada pengusaha yang belum memiliki izin, padahal peraturan Bupati Rokan Hilir telah berjalan selama tiga tahun.

Salah satu Badan atau Dinas Pemerintah yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap izin pengelolaan dan pengusahaan ini adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah yang disingkat dengan ( Bapedalda ). Bapedalda merupakan lembaga pemerintah yang bertugas mempunyai kewenangan untuk menertibkan penertiban sarang burung walet yang ada di Kabupaten Rokan Hilir

Namun sampai saat sekarang ini para Pengusaha Burung Walet yang ada di Kabupaten Rokan Hilir belum melaksanakan atau megindahkan Peraturan Bupati No. 09 tahun 2007 mengenai tentang izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet. Sehingga untuk mengantisipasi pengawasan penangkaran sarang burung walet Pemerintah Rokan Hilir telah menerbitkan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 27 tahun 2007 tentang Penertiban Bangunan dan Bangunan Sarang Burung Walet Di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir yang menjelaskan bahwa semua bangunan dan bangunan sarang burung walet yang ada, khususnya di Ibu Kota Kabupaten Rokan Hilir Bagan Siapiapi terutama Kecamatan Bangko perlu diadakan penertiban, agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga untuk menertibkan hal sebagaimana yang dimaksud diatas perlu dibentuk tim yang melibatkan semua unsur badan/dinas/instansi terkait.

Dalam melaksanakan kegiatan penertiban ini tim pemantau dan penertiban penangkaran burung walet Kabupaten Rokan Hilir menunjuk personil dan membentuk susunan anggota yang bertugas:

- a. Pemantauan terhadap bunyi pita kaset burung walet.
- b. Kegiatan pengusaha dalam penertiban penangkaran burung walet di Kabupaten Rokan Hilir.
- c. Melakukan tindakan persuasif pengusaha di lapangan.
- d. Pelaporan pengusaha walet

Didalam Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2007 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet pada pasal 9 menjelaskan bahwa :

- a. Kewajiban pengusaha walet yang memiliki izin
  - 1. Menjaga ketertiban, keamanan, dan kesehatan serta lingkungan tempat usahanya.
  - 2. Mencegah terjadinya pencemaran lingkungan
  - 3. Melakukan pemantauan pada setiap bulan sekali dengan menggunakan alat pengukur suara dan membuat laporan pemantauan setiap 3 bulan sekali.
  - 4. Melaporkan kepada instansi atau pejabat yang ditunjuk apabila ada perubahan tempat usahanya.
  - 5. Memasang papan plak tanda daftar perizinan.
  - 6. Menaati semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.
- b. Larangan Bagi Pemegang Izin Walet



1. Dilarang membunyikan kaset pita burung walet kecuali pada jam yang telah ditetapkan yaitu jam 16.00 sampai 19.30 WIB.
2. Membunyikan suara kaset burung walet melebihi 55 disibel (db)
3. Di larang melakukan penangkaran Sarang Burung Walet disekitar Perkotaan
4. Pendidikan
5. Perumahan penduduk
6. Rumah ibadah dan
7. Tempat pelayanan kesehatan masyarakat

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat jumlah pengusaha yang terdapat pada Kabupaten Rokan Hilir yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1.1: Daftar Pengusaha Walet yang ada di Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Bangko**

No.	Nama Pemilik	Alamat
1.	Ong Ka Cing	Jl. Perdagangan No. 125/E
2.	Ang Cing Suan	Jl. Gg. Sumatera No. 28/E
3.	Kuslandi	Jl. Gereja No. 61/E
4.	Nadeak	Jl. Gereja No. /E
5.	Ang Bun Lim	Jl. Gereja No. /E
6.	Hendra / A Hang	Jl. Perdagangan No. 29/B
7.	Linawati/Alisan	Jl. Perdagangan No. 25/B
8.	Bun Pin	Jl. Perdagangan No. 17/B
9.	Kamsidi	Jl. Perdagangan No. 31/B
10.	Iwantono	Jl. Perdagangan No. 35/B
11.	A Huat	Jl. Gg. Alisan No. 1
12.	Supama Sahya	Jl. Perdagangan No. 27/B
13.	She Ling	Jl. Perdagangan No. 21
14.	Dedi	Jl. Perniagaan Gg. I No. 14/B
15.	A Hui	Jl. Perniagaan Gg. I No. 15/B
16.	Lintong	Jl. Perniagaan Gg. I No. 13/B
17.	Edi	Jl. Perniagaan Gg. I No. 8/B
18.	Chiok	Jl. Perniagaan Gg. I No. 3/B
19.	Sarlie	Jl. Sei Garam No. 22/A

20.	Kong Cuan	Jl. Sei Garam No. 35
21.	Kate	Jl. Sei Garam No. 37
22.	A Cai	Jl. Sei Garam No. 27/B
23.	Thian Pong	Jl. Sei Garam No. 9
24.	Balawi	Jl. Sei Garam No. 33
25.	Yu Chin	Jl. Sei Garam
26.	Kim Lai	Jl. Perniagaan Gg I No. 18/B
27.	Kho Tian Hong	Jl. Sei Garam No. 33
28.	Guantonio	Jl. Sei Garam No. 1
29.	Khim Hein/Salimun	Jl. Sei Garam No. 7
30.	Ang Abie	Jl. Perniagaan Gg. I No. 56/B
31.	Sumiati	Jl. Perniagaan Gg. I No. 17/B
32.	Hui Bing	Jl. Perdagangan No. 58/B
33.	Yanti	Jl. Perdagangan No. 32/B
34.	Edi Wijaya	Jl. Perniagaan Gg. I No. -
35.	Sugiman	Jl. Perniagaan Gg. I No. 5/B
36.	Cheng Hu	Jl. Perniagaan Gg. I No. 11/B
37.	Samsuar	Jl. Perniagaan Gg. I No. 6/B
38.	Wijaya	Jl. Pasar Ikan No. 5/B
39.	Intan Saodah	Jl. Pasar Ikan No. 49/B
40.	Wijana	Jl. Sei Garam No. 24/B
41.	Toni Suekto	Jl. Sei Garam No. 31/B
42.	Agus	Jl. Sei Garam No. 28/B
43.	Acai	Jl. Sei Garam No. /B
44.	Tjandra	Jl. Sei Garam No. 2/B
45.	Hamid	Jl. Muslimin No. 1/B
46.	She King	Jl. Muslimin No. 7/B
47.	Kim San	Jl. Muslimin No. 6/B
48.	A Tak	Jl. Gd. Nasional No. 33
49.	A Rena	Jl. Perniagaan Gg II No. 1/B
50.	A Cai	Jl. Perniagaan Gg II No. 5/B
51.	Cun Cuan	Jl. Perdagangan No. 9/B
52.	Hanyai	Jl. Perdagangan No. 102/B
53.	Hasiyu	Jl. Perniagaan Gg. Pelita
54.	A Su	Jl. Perniagaan Gg. Pelita
55.	A Tong	Jl. Perniagaan Gg. Pelita
56.	Kim Tak	Jl. Perniagaan Gg. Pelita
57.	Se Ing	Jl. Perniagaan No. 122/B
58.	Johan Kadir	Jl. Perniagaan Gg. Pelita
59.	Nasrul	Jl. Perniagaan No.-
60.	Sunarjak	Jl. Perniagaan No.-
61.	Sum Tek	Jl. Perniagaan Gg III No. 12/B
62.	Cik Kiat	Jl. Perniagaan No. 6/B
63.	Tjandra	Jl. Perniagaan No. 51/B

64.	Hasan	Jl. Gd. Nasional No. 35/B
65.	She Kok	Jl. Muslimin No.-
66.	Intan Saura	Pasar Pelita Tk. Nusantara No. 3
67.	King Kok	Pasar Pelita Tk. Bintang Jaya
68.	Bastian	Jl. Pemiagaan No. 20
69.	Liong	Jl. Sei Garam
70.	A Tong	Jl. SGB
71.	A Seung	Jl. Gg. HKBP
72.	Gunawan	Jl. Pelabuhan Baru No. 9
73.	Setiami	Jl. Sei Garam
74.	Suka Maju	Jl. Sei Garam
75.	Liong	Jl. Sei Garam
76.	Awi	Jl. Sei Garam
77.	Ong Cin	Jl. Muslimin No. 01
78.	Bastian	Jl. Sei Garam
79.	Kusnandi	Jl. Gereja Ujung
80.	She Pin	Jl. Bintang Ujung No. 89/E
81.	Sumardi Djojo	Jl. Sentosa
82.	A Hok	Jl. Pahlawan
83.	A Hok	Jl. Pahlawan
84.	An Co Kun	Jl. Pahlawan
85.	Liam Kok	Jl. Sumatera 42/B
86.	Si Lien Kiong	Jl. Sumatera
87.	Lim Bok	Jl. Sumatera
88.	A Taw	Jl. Merdeka Gg. Merdeka
89.	Ngo San	Jl. Merdeka Gg. Merdeka
90.	Ano	Jl. Merdeka Gg. Merdeka
91.	A Sang	Jl. Merdeka Gg. Merdeka
92.	Roski	Jl. Merdeka Gg. Merdeka NO. 99/E
93.	Ang Can	Jl. Merdeka Gg. Merdeka
94.	Tong Kang	Jl. Perdagangan
95.	Kia Cing	Jl. Merdeka Gg. Merdeka
96.	Santy	Jl. Mawar
97.	Saimin	Jl. Mawar 16/B
98.	Kl San	Jl. Mawar
99.	A Guan	Jl. Mawar
100.	Giok Pui	Jl. Mawar
101.	A Cui Mahadi	Jl. Mawar
102.	A Siong	Jl. Mawar
103.	A Hui	Jl. Mawar
104.	Kun Thiam	Jl. Kelenteng
105.	Ku Siong	Jl. Kelenteng
106.	Ah Am	Jl. Kelenteng
107.	A Cing	Jl. Kelenteng

108.	A Beng	Jl. Kelenteng
109.	A San	Jl. Kelenteng
110.	Sudisto Kasmudin	Jl. Kelenteng No. 33 B
111.	Tiau Kie	Jl. Kelenteng
112.	Kwang Teng	Jl. Kelenteng
113.	A Hui	Jl. Kelenteng
114.	A Ho	Jl. Kelenteng
115.	Agus Yakub an Tian Kok	Jl. Mawar
116.	Lai-Lai/Pong-Pong	Jl. Mawar
117.	Gi Ting	Jl. Mawar
118.	Ah Wa	Jl. Mawar
119.	Sing Kiat	Jl. Mawar
120.	Kwang Beng	Jl. Mawar
121.	Ek Cing	Jl. Sumatera
122.	Kie Lin	Jl. Sumatera
123.	Sa Kok	Jl. Sumatera
124.	Pong – Pong	Jl. Sumatera
125.	Purnahadi / Dr. W. Pang	Jl. Perdagangan
126.	G. Ok Ciu	Jl. Perdagangan
127.	Pong-pong/Lai-Lai	Jl. Perdagangan
128.	A Bing	Jl. Perdagangan
129.	A Kau	Jl. Perdagangan
130.	Ya Ho	Jl. Perdagangan
131.	Ong Liong	Jl. Perdagangan
132.	Asiu	Jl. Perdagangan
133.	Eden/Adi	Jl. Perdagangan No. 46
134.	Lisfuti Suwandi	Jl. Perdagangan
135.	Jimmy	Jl. Perdagangan
136.	A Hu	Jl. Perdagangan
137.	Toko Obat Harapan	Jl. Perdagangan
138.	Okaw	Jl. Sentosa
139.	Ang Ah Ho	Jl. Sentosa
140.	A Ban	Jl. Sentosa
141.	Lau Huat	Jl. Sentosa
142.	Wangen	Jl. Sentosa
143.	Liong Bun	Jl. Sentosa
144.	Kaw Hian	Jl. Sentosa
145.	O Tie	Jl. Sentosa
146.	Bie Liong/Ng Bie Kong	Jl. Sentosa
147.	Salim	Jl. Sentosa 35 B
148.	Lasnini	Jl. Aman
149.	Im Tie	Jl. Aman
150.	Ki Hok	Jl. Aman
151.	Pa Ba	Jl. Aman

152.	Ang Sieng	Jl. Aman
153.	Bic Huan	Jl. Aman
154.	Kwie Tie/Su Cuan	Jl. Aman
155.	Cu Lien	Jl. Aman
156.	To Puik Hai	Jl. Aman
157.	Hamono/A Tian	Jl. Aman
158.	Tiang Sing	Jl. Aman
159.	A Cia	Jl. Aman
160.	A Cai	Jl. Aman
161.	Karsono	Jl. Merdeka No. 23/B
162.	Tjeng Hwa Siong	Jl. Merdeka No. 21/B
163.	Sartono	Jl. Merdeka No. 38/B
164.	Julianto	Jl. Merdeka No. 13/B
165.	Sam Suri	Jl. Merdeka No. 11/B
166.	Jutimin	Jl. Merdeka No. 16/B
167.	Marwan	Jl. Merdeka No. 12/B
168.	Jasman	Jl. Merdeka No. 6/B
169.	Si Lam	Jl. Merdeka No. 4/B
170.	Tk. Mas Dwi Jaya	Jl. Merdeka No. 2/B
171.	Edi	Jl. Merdeka No. 1/B
172.	A Bun	Jl. Merdeka No. -
173.	Lily	Jl. Merdeka No. 21/B
174.	Sulung	Jl. Merdeka No. 19/B
175.	Ai	Jl. Sentosa No. 31/B
176.	A Ling	Jl. Sentosa No. 15/B
177.	Sugimin	Jl. Sentosa No. 13/B
178.	Tian Sa	Jl. Sentosa No. 5/B
179.	Sukiman	Jl. Sentosa No. 3/B
180.	Beng Pho	Jl. Sentosa No. 1/B
181.	Anna	Jl. Perniagaan No. 19/B
182.	Kun Tiam	Jl. Perniagaan No. -/B
183.	Rudianto	Jl. Aman No. 7/B
184.	Lilis	Jl. Aman No. 13/B
185.	Unior	Jl. Aman No. 15/B
186.	Nyonya Suwan	Jl. Aman No. 19/B
187.	A Beng	Jl. Aman No. 23/B
188.	Ming Sien	Jl. Perdagangan No. 12/B
189.	Eci/Yakin	Jl. Perdagangan No. 14/B
190.	Leng Jok	Jl. Perdagangan No. 24/B
191.	Yan Hui	Jl. Perdagangan No. 26/B
192.	Tang Hui Tjuan	Jl. Perdagangan No. 32/B
193.	Hui Tiong	Jl. Perdagangan No. 34/B
194.	Sabiran	Jl. Perdagangan No. 36/B
195.	Iyu Hu	Jl. Perdagangan No. 20/B

196.	Sugianto	Jl. Kelembeng No. 10/B
197.	Kusni	Jl. Kelembeng No. 20/B
198.	Tong Kim	Jl. Sumatera No. 47/B
199.	Lei Hwa/Hartono	Jl. Bintang No. 23/E
200.	A Ping	Jl. Bintang No. 33/E
201.	Kang Cui	Jl. Sadar No. 40/E
202.	Ong Sing	Jl. Sadar No. 20/E
203.	Coa Hui	Jl. Sadar No. 16/E
204.	Anto	Jl. Sadar No. 4/E
205.	Ediyanto	Jl. Sumatera No. 27/E
206.	Tian Co	Jl. Sumatera No. 29/E
207.	Kim Hin	Jl. Sumatera No. 31/E
208.	Ki Hok	Jl. Sumatera No. -
209.	Sutomo	Jl. Sumatera No. -
210.	Ong Bun San	Jl. Sumatera No. 23
211.	Ang Ci Cai	Jl. Sumatera No. 21
212.	Anto	Jl. Sumatera No. 17
213.	William Pang/Djohan Pangestu	Jl. Sumatera No. 7
214.	Ing Kok King	Jl. Sumatera No. 5
215.	Ong Cui Lie	Jl. Sumatera No. 3
216.	Toko Asean	Jl. Sumatera No. 1
217.	Kheng Cing Hong	Jl. Perdagangan No. 82
218.	O Liong	Jl. Perdagangan No. 84
219.	An. So Sieng Tek	Jl. Perdagangan No. 98
220.	Ang Tek Sing	Jl. Perdagangan No. 122/A
221.	Syamsi	Jl. Perdagangan No. 132/E
222.	O Liong	Jl. Sadar No. 1
223.	Kho Cing Pho	Jl. Sadar No. 7
224.	Hok Ing	Jl. Sadar No. 25
225.	A Bil	Jl. Sadar No. 37
226.	A Hun	Jl. Sadar No. 78/A/E
227.	Yulitar	Jl. Perniagaan Gg. Melati
228.	Aswan	Jl. Perniagaan Gg. Melati
229.	Li Caw	Jl. Manggis
230.	Bing An	Jl. Perniagaan Gg. Melati
231.	Ang Lei Hok	Jl. Sentosa No. 7/B
232.	Le Tjin	Jl. Sedar No. 22/E
233.	Martias Andika	Jl. Aman No. 27/B
234.	Eliati	Jl. Perdagangan No. -
235.	Asan Alawi Un	Jl. Merdeka No. 47/B
236.	Yap Tjeng Sjiu	Jl. Perniagaan No. 104/B
237.	Yap Tjeng Sjiu	Jl. Perniagaan Gg. Pelita No. 2/B
237.	Ha Tang	Jl. Perniagaan Gg. Pelita No. 17/B
238.	Kiem Hoi	Jl. Perniagaan No. 99/B

239.	Siu Ha	Jl. Perniagaan No. 185/E
240.	Suwarni Surya	Jl. Perniagaan No. 75/E
241.	Hock Tjai Djahri	Jl. Perwira No. 80/E
242.	Lan Tie	Jl. Sentosa No. 1/B
243.	Tong	Jl. SGB
244.	Wodi Hartono	Jl. Kelenteng 31/B
245.	Lasnini	Jl. Aman No. 12/B
246.	Lasnini	Jl. Mawar No. 25
247.	Giok Ui	Jl. Mawar No. 41/B
248.	Sumardi Djojo	Jl. Utama No. 99/B
249.	Shepin	Jl. Sumatera No. 89/E
250.	Ah Hwan	Gg. Merdeka
251.	Giok Lan	Gg. Merdeka
252.	Tjeng Suan Eddy	Gg. Sumatra No. 28/e
253.	Tian Kang	Gg. Sumatra No. 41/e
254.	Martias Andika	Jl. Aman No. 27/B
255.	Syafrudin	Jl. Perwira
256.	Narwiny	Jl. Sentosa No. 15/b
257.	Irwan/jumidi	Jl. Mawar No. 20b
258.	Lina	Jl. Aman No. 40
259.	Sutomo Sakiya Himalaya	Jl. Sumatra No. 93
260.	Husnan	Jl. Satria 11 F
261.	Armis Murni	Jl. Merdeka No. 5e
262.	Armis Murni	Jl. Perniagaan No. 26e
263.	Sarbeni	Jl. Manggis No. 7e
264.	Tjeng Liang	Jl. Gedung Nasional 33e
265.	Jimmy Lie	Jl. Mawar No. 20b
266.	Berjani	Jl. Perdagangan 40 b
267.	Sok Hun	Jl. Merdeka
268.	Giok Ping	Jl. HKBP
269.	Po Tju	Jl. Perdagangan 273e
270.	Chandra Wijaya	Jl. Sumatra 36e
271.	Kartono	Jl. Aman 52
272.	Edy Sutaripin	Jl. Perniagaan 57b
273.	Sartono Basrun	Jl. Merdeka No. 36e
274.	Kaman Tasman	Jl. Manggis No. 18
275.	Ho Kok	Jl. Sumatra 42
276.	Gunawan Amin	Jl. Perniagaan 130b
277.	M. Sopyan	Jl. Merdeka 58b
278.	Ing Hin	Jl. Bintang 89e
279.	Yohan	Jl. Siakap 37 f
280.	Pek Hun	Jl. Perniagaan 62b
281.	Kim Tjin	Gg. Sumatra
282.	Leng Tie	Jl. Perniagaan 32b



283.	Djumina	Jl. Sentosa 6b
284.	Buini	Jl. Perdagangan 153e
285.	Wisdom Chen	Jl. Perdagangan 12b
286.	Lindawati	Jl. Pahlawan
287.	Josep	Jl. Sentosa 41
288.	Halim Jesman	Jl. Kelenteng 31/b
289.	Rusdiono	Jl. Utama Ujung
290.	Unjo Tiang Tjiu	Jl. Kelenteng No. 28/B
291.	Ted/Yanto	Jl. Perniagaan No. 29/B
292.	Nisah Kirman	Jl. Perniagaan Gg. I No. 24/B
293.	Tiaw Eng	Jl. Pahlawan
294.	Siu Kim	Jl. Gereja No. 11/D
295.	Thomas Edison	Jl. Perdagangan No. 50/B
296.	Halim Cukri	Jl. Gg. Sumatera
297.	Riyanto Surya	Jl. Perniagaan
298.	Harlina	Jl. Siakap No. 15/F
299.	Sin Tjo	Jl. Gg. Gd. Nasional No. 13/B
300.	Martin	Jl. Perniagaan No. 42/B
301.	Phieng Tong	Jl. Perdagangan No. 99/B
302.	Dr. Sherman Wirly	Jl. H. Yahya No. 2/E
303.	Nisah Kirman	Jl. Perniagaan Gg. I No. 22/BA
304.	Sutikno	Jl. Perniagaan No. 128/B
305.	Hermawan	Jl. Perniagaan No. 106/B
306.	Ludin Badrun	Jl. Gg. Imigrasi
307.	Hok Kie	Jl. Mawar No. 36/B
308.	Sulung	Jl. Merdeka No. 19/B
309.	Tjheng Tjui	Jl. Perniagaan No. 31/B
310.	Rusdi	Jl. Perdagangan No. 189/B
311.	Rudy	Jl. Pahlawan No. 84/B
312.	Amir	Jl. Aman No. 40/B
313.	William/Kang Hok	Jl. Perwira No. 62/B
314.	Emiaty	Jl. Merdeka No. 30/B
315.	Brother	Jl. Utama
316.	Hoslan Sulaiman	Jl. Manggis

Sumber : *Bapedalda Kabupaten Rokan Hilir 2010*

Pada Tabel diatas dapat dilihat bahwa potensi yang ada di Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Bangko yang berasal dari penangkaran burung walet dinilai cukup potensial. Dimana setiap Desa di Kecamatan Bangko yang ada, masing – masing memiliki penangkaran burung walet hal ini akan menambah



manfaat bagi peningkatan perekonomian masyarakat yang berkelanjutan. Dari 316 pengusaha walet yang ada di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir yang memiliki izin usaha artinya peraturan ini telah disosialisasikan dan telah berjalan selama 3 tahun sedangkan yang tidak memiliki izin 145 usaha walet, hal ini tentunya dapat merugikan pendapatan asli daerah. Dalam melaksanakan penertiban penangkaran sarang burung walet ini diterbitkan peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk Peraturan Bupati ( PERBUB ) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 09 Tahun 2007 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.

Namun demikian masih banyak pengusaha yang enggan mengurus izin dari usaha walet ini, alasan bagi pengusaha yang tidak memiliki izin tidak adanya sosialisasi dari pada Perhub No 09 tahun 2007 tentang izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet sehingga berdampak negatif terhadap pembayaran pajak burung walet yang sangat merugikan PAD dari daerah tersebut yaitu Kabupaten Rokan Hilir, dalam proses pembayaran pajak tersebut, masih banyak pengusaha yang tidak membayar pajak walet karena secara administrasi mereka belum memahami pelaksanaan pembayaran pajak, kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dalam menjalankan pembangunan pemerintah, Penghasilan walet dengan pembayaran pajak tidak ada kesesuaian dan pengusaha mengakui belum mengetahui sistem penetapan pembayaran pajak sehingga merasa tidak memahami dan kurang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan pembayaran pajak burung walet.

Dari permasalahan tersebut diatas serta dengan fenomena yang ada penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul yaitu, ***“Peranan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah ( BAPEDALDA) Kabupaten Rokan Hilir Dalam Penertiban Penangkaran Burung Walet ( Studi Di Kecamatan Bangko) ”***

## **1.2. Perumusan Masalah**

Dari gambaran permasalahan dan fenomena di atas, maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada dampak dibuatnya Peraturan Bupati dengan permasalahan pokoknya adalah : “Bagaimanakah Peranan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kabupaten Rokan Hilir dalam Penertiban Penangkaran Burung Walet (Studi Di Kecamatan Bangko)

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peranan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah ( Bapedalda ) Kabupaten Rokan Hilir Dalam Penertiban Penangkaran Burung Walet ( Studi Di Kecamatan Bangko )

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun harapan Penulis, yang menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Guna teoritis, bahwa dari hasil penelitian ini di harapkan dapat memacu perkembangan ilmu pemerintahan minimal dapat memperkaya inventaris hasil-hasil penelitian di bidang ilmu pemerintahan pada umumnya, dan inventaris ilmu penelitian dibidang system pelaksanaan kebijakan daerah.
2. Guna Akademis, hasil penelitian ini juga di harapkan sebagai bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan Akademis lainnya yang akan melaksanakan penelitian dalam kasus yang sama.
3. Guna Praktis, dari hasil penelitian ini dapat diharapkan sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir pada umumnya dan Kecamatan Bangko pada khususnya dalam pelaksanaan penertiban penangkaran burung walet di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir secara maksimal.

#### **I.5. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan ini peneliti menuangkan kedalam enam bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

#### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini berisikan teori-teori atau konsep yang sesuai dan melandasi penelitian sehingga dapat mendukung penelitian yang akan dilakukan.

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini berisikan tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengukuran data, metode pengumpulan data dan analisa yang telah dikumpulkan

### **BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Bab ini berisikan tentang keadaan umum Kabupaten Rokan Hilir, geografi Kabupaten Rokan Hilir, Demografi, Sejarah Bapeldalda Kabupaten Rokan Hilir, Kewenangan serta tugas pokok dan fungsi Bapeldalda Kabupaten Rokan Hilir, serta Visi Misi Bapeldalda Kabupaten Rokan Hilir.

### **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini memuat hasil dari penelitian pembahasan yang telah dilakukan.

### **BAB VI : PENUTUP**

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang membangun bagi objek penelitian agar bisa lebih baik lagi kedepannya.

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

#### **2.1. Teori Kebijakan Publik**

Apabila dilihat secara harfiah ilmu kebijakan publik terjemahan dari kata "policy science". Tokoh atau penulis kebijakan publik adalah "William Dunn, Charles Jones, Lee Friedman" mereka menggunakan kata "public policy, public dan policy Analisis" dengan pengertian yang berbeda. Dunn, (2003 : 22) mengemukakan proses pembuatan kebijakan adalah Serangkaian aktifitas intelektual yang dilakukan didalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktifitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan digambarkan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan.

Di Indonesia menggunakan istilah " kebijaksanaan dan kebijakan " dari terjemahan policy yang dikaitkan dengan keputusan pemerintah. Hal ini diilhami oleh kata yang mempunyai arti kewenangan dan kekuasaan yang dipegang oleh pemerintah, bertujuan untuk mengarahkan dan bertanggung jawab melayani umum. Pandangan ini disejalkan dengan pengertian "PUBLIC" yang berarti pemerintah, masyarakat dan umum. Perbedaan antara kebijaksanaan dan kebijakan, yang membedakan istilah "policy" sebagai keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat, dengan istilah "discretion" yang diartikan keputusan yang bersifat kasuistik untuk satu hal. Kata

kebijakan secara etimologis berasal dari kata “polis” dalam bahasa Yunani (Greek) artinya “Negara Kota “. Dalam bahasa latin yaitu politik atau Negara. Bahasa Inggris lama (middle english) dinilai *policie* yaitu berkaitan dengan urusan pemerintah atau administrasi-pemerintah (Dunn, 2003 : 27 ). Kemudian dalam bahasa Indonesia “ kata kebijakan dan kebijaksanaan” bijak atau bijaksana dalam bahasa Inggris “wisdom”. Asal katanya “Wise”. Dari pengertian ini sifat bijaksana ini bukan hanya sekedar “pintar atau cerdas (smart)”.

Kajian tentang kebijakan dalam arti luas sebagai usaha pengadaan informasi yang diperlukan untuk menunjang proses pengambilan kebijakan ada sejak manusia mengenal organisasi dan tahu arti keputusan. Kajian kebijakan dimulai dari paling irasional sampai pada yang rasional dengan mengkombinasikan kuantitatif-kuantitatif. Sebagai suatu ilmu kebijakan itu baru dikenal setelah perang dunia ke II.

Pada saat sekarang persoalan public menjadi lebih kompleks. Tidak ada satu masalah hanya “satu” aspek yang berdiri sendiri, tetapi terdiri dari berbagai aspek yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Keterkaitan itu tidak terbatas pada satu lingkungan tertentu, tetapi dapat dipengaruhi oleh berbagai lingkungan yang luas yang berkaitan dengan aspek-aspek yang berbeda-beda dan berlaku secara cepat.

Selanjutnya dilihat dari definisi kebijakan yang dikemukakan oleh Abdul Latief (2005 : 88) yang mengemukakan bahwa kebijakan adalah kata kebijaksanaan yaitu, perilaku seseorang terlaksana pejabat atau perorangan, kelompok kekuatan politik atau kelompok pakar atau instansi pemerintahan yang

terlibat dalam suatu bidang kegiatan tertentu yang diarahkan pada rumusan masalah atau permasalahan yang sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu. Untuk selanjutnya mengacu kepada tindak atau tindakan berpola yang mengarah kepada tujuan seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan dan atau mewujudkan sasaran yang ingin dicapai.

Kemudian Koryati (2005 : 7) mengemukakan bahwa secara umum kebijakan dapat dikatakan sebagai rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah publik yang mempunyai tujuan, rencana, dan program yang akan dilaksanakan secara jelas. Lebih lanjut Anderson dalam koryati (2005 :7) mengemukakan bahwa, kebijakan merupakan pengembangan yang dilakukan oleh institusi pemerintah dan aparaturinya. Sehingga kebijakan tersebut dapat dikatakan bahwa:

1. Kebijakan pemerintah selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan.
2. Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat pemerintah.
3. Kebijakan merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang baru menjadi maksud atau pernyataan pemerintah untuk melakukan sesuatu.
4. Kebijakan pemerintah itu bersifat positif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan.

5. Kebijakan pemerintah dalam arti yang positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa (otoritatif).

Dalam mengukur pelaksanaan kebijakan tersebut Hugh Heglo dalam Dunn (2003 : 29) menyebutkan kebijakan sebagai suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan (a course of action intended to accomplish some end). Definisi Heglo ini selanjutnya diuraikan oleh Charles Jones dalam kaitan dengan beberapa isi uraian kebijakan yaitu;

1. Tujuan yaitu tujuan tertentu yang dikehendaki untuk dicapai.
2. Rencana atau proposal yaitu alat atau cara mencapai tujuan.
3. Program atau cara tertentu untuk mendapatkan persetujuan atau pengesahan untuk mencapai tujuan.
4. Keputusan yaitu tindakan tertentu yang diambil untuk menentukan tujuan, membuat dan menyesuaikan rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program.
5. Dampak (effect) yaitu yang ditimbulkan dari suatu program dalam masyarakat.

Dapat juga dilihat pendapat Edward (dalam Winarno 2007 :174) mengemukakan bahwa empat faktor atau variabel krusial dalam implementasi kebijakan publik adalah:



- a. Komunikasi adalah implementasi kebijakan yang efektif yaitu mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus dilakukan.
- b. Sumber-sumber adalah merupakan factor yang penting dalam melaksanakan kebijakan public yang meliputi adanya staf, wewenang dan fasilitas yang diperlukan.
- c. Kecendrungan-kecendrungan adalah dampak yang ditimbulkan dalam pelaksanaan kebijakan politik yang dinilai menerima dan menolak kebijakan yang telah ditetapkan.
- d. Struktur birokrasi adalah langkah yang dilalui dalam menyelesaikan permasalahan dalam menjalankan kebijakan public.

Selanjutnya dapat dilihat konsep analisis kebijakan yang dikemukakan oleh Quede dalam Dunn (2003 :45) bahwa analisa kebijaksanaan adalah sebuah disiplin ilmu yang menggunakan berbagai metode penelitian dan argument untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijaksanaan sehingga dapat dimanfaatkan ditingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijaksanaan.

Selanjutnya dapat dilihat pengertian kebijakan politik yang dikemukakan oleh Richard Rose dalam Budi winarno (2007 : 16) bahwa kebijakan public adalah serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekwensi-konsekwensinya bagi mereka yang bersangkutan dari pada sebagai suatu keputusan tersendiri.

Budi Winarno (2007 : 144) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Dimana implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai actor, organisasi, prosedur, teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya meraih tujuan-tujuan kebijakan dan program-program. Riant Nugroho (2004 : 158) menjelaskan bahwa perumusan kebijakan adalah inti dari kebijakan publik yang ditujukan untuk melakukan intervensi terhadap kehidupan public untuk meningkatkan kehidupan public itu sendiri yang dinilai dari ketersediaan kemampuan sumber daya manusia.

Sementara itu Riant Nugroho (2004 : 158) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya yang memiliki rangkaian kegiatan:

1. Program intervensi
2. Proyek intervensi
3. Kegiatan intervensi
4. Umpan balik (masyarakat/public)

## **2.2. Otonomi Daerah**

Otonomi daerah dapat dirumuskan dalam tiga ruang lingkup intraksinya yang utama : Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya ( Syaukani, 2002 ). Dibandng politik, karena otonomi adalah buah dari kebijakan desentralisasi dan demokratis,

memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintah yang merespon terhadap masyarakat luas dan memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggung jawaban publik. Demokrasi pemerintahan juga berarti adanya transparansi kebijakan. Artinya untuk setiap kebijakan yang diambil harus jelas siapa yang memprakasai kebijakan itu, apa tujuannya, berapa ongkos yang dipikul, siapa yang diuntungkan, apa resiko yang ditanggung, dan siapa yang harus bertanggungjawab jika kebijakan itu gagal. Otonomi daerah juga berarti kesempatan membangun struktur pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan daerah, membangun system dan pola karir politik dan administrasi kompetitif, serta mengembangkan system manajemen pemerintahan yang efektif.

Di bidang ekonomi, otonomi daerah disatu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, dan pihak lain terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan regional dan local untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi daerahnya. Dalam konteks ini, otonomi daerah akan memungkinkan lahirnya berbagai prakarsa pemerintah daerah menawarkan fasilitas investasi, memudahkan proses perizinan usaha, dan membangun infrastruktur yang menunjang perputaran ekonomi daerah. Dengan demikian, otonomi daerah akan membawa masyarakat ke tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dari waktu ke waktu.

Di bidang social dan budaya otonomi daerah harus dikelola sebaik mungkin dime menciptakan dan memelihara harmoni social, dan pada saat yang sama, memelihara nilai-nilai local yang dipandang kondusif dalam menciptakan

kemampuan masyarakat untuk merespon dinamika kehidupan sekitarnya. ( ICCE UIN Jakarta : 2003 ). Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah dengan otonomi adalah prose peralihan dari sistem dekonsentrasi ke sistem desentralisasi. Otonomi adalah penyerahan urusan Pemerintah Pusat kepada Daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintah. Tujuan otonomi daerah adalah mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan urusan ini adalah antara lain; menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan pada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan. Sejalan dengan penyerahan urusan, apabila urusan tersebut akan menjadi beban daerah, maka akan dilaksanakan melalui asas “ medebewind” atau asas pembantuan. Prose dari deentralisasi ke desentralisasi ini pada dasarnya tidak semata-mata desentralisasi administratif, tetapi juga bidang politik dan sosial budaya. Dengan demikian dampak pemberian otonomi ini tidak hanya terjadi organisasi/ administrasi lembaga pemerintah daerah saja, akan tetapi juga berlaku pada masyarakat ( *public* ), badan atau lembaga pemerintah swasta dalam berbagai bidang. ( HAW. Wijadjaja, 2000 : 76-77 )

Dengan rumusan dan tujuan otonomi daerah semacam ini, keberadaan kebijakan otonomi daerah akan mampu menciptakan sistem pemerintahan

demokratis. Argument dasarnya adalah dengan konsep tersebut diasumsikan masyarakat akan memiliki akses paling besar dalam mengontrol penyelenggaraan pemerintah di daerah. Sementara pada sisi lain, pemerintah daerah sendiri, akan lebih responsive terhadap berbagai tuntutan yang datang dari komunitasnya. Dengan demikian, agenda demokratisasi merupakan sesuatu yang tidak boleh diabaikan dalam pelaksanaan yang lebih baik masyarakat daerah menjadi pencapaian. Keterikatan otonomi daerah dengan demokratisasi pernah diungkap muhamamad hatta, proklamator RI, dalam suatu kesempatan, “ memberikan otonomi daerah tidak saja berarti menjalan demokrasi, tetapi mendorong berkembang nya *auto aktiviti*. Auto aktiviti artinya bertindak sendiri, dengan berkembangnya auto aktiviti tercapai lah apa yang dimaksud dengan demokrasi. Yaitu, pemerintah yang dilaksanakan oleh rakyat, untuk rakyat. Rakyat tidak saja menentukan nasibnya sendiri”.

Pentingnya agenda demokratisasi dalam rangka otonomi daerah antara lain bertolak dari asumsi bahwa cita-cita demokrasi, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh unsure bangsa tidak semata-mata ditentukan bentuk negara melalui sistem politik yang menjamin berlakunya mekanisme *check and blance*, distribusi kekuasaan secara sehat dan fair, adanya akuntabilitas pemerintah, tegaknya supremasi hukum dan HAM, serta struktur ekonomi yang adil dan berorientasi kerakyatan. Kesemua itu jauh lebih penting dari sekedar bentuk negara.

Sebagai bagian dari agenda demokratisasi, otonomi daerah mensyaratkan pula adanya perubahan struktur perwakilan politik, berlakunya akuntabilitas pemerintah, tegaknya supremasi hukum, dan rasionalitas birokrasi, baik ditingkat

pusat maupun daerah. Karena itu, ekonomi daerah sebagai paradigma mengharuskan perubahan struktur lembaga kenegaraan, sistem pemilu, restrukturisasi lembaga peradilan, dan perubahan birokrasi patrimonial yang mengabdikan pada kekuasaan menjadi birokrasi nasional rasional yang melayani kepentingan masyarakat. Tujuan peraturan otonomi daerah adalah untuk memungkinkan daerah serta mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Tujuan pemberian otonomi kepada daerah juga dijelaskan ditempat lain dalam penjelasan umum juga, dengan kata-kata sebagai berikut: tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa.

Namun demikian dengan kondisi pelaksanaan otonomi tersebut tidak akan lepas dari kondisi pelaksanaan sistem pemerintahan tersebut. Dengan kata lain bahwa dengan berjalannya sistem otonomi daerah tersebut akan cenderung baik terhadap sistem pemerintahan tersebut.

Pada dasarnya sistem pemerintahan tersebut baik akan didukung oleh kondisi pembangunan masyarakat yang akan turut disertai dengan kondisi lingkungan dimana masyarakat tinggal dan berkembang. Hal tersebut akan mempengaruhi usaha masyarakat dalam turut serta pembangunan dan akan berdampak pada kepatuhan terhadap aturan yang ditetapkan. Disamping itu

kondisi kepemimpinan pemerintahan akan turut mempengaruhi jalannya otonomi tersebut

### 2.3. Pengertian Pajak

Prof. Dr. PJA. Adriani dalam (Bohari, 2008 :23) memberikan definisi sebagai berikut Pajak adalah iuran pada negara yang dapat dipaksakan yang terhutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi yang langsung dapat ditunjuk, yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas pemerintah. Pajak menurut Soeparman Dalam ( Waluyo,2007:3) adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Sedangkan menurut Ismawan (2001:4) Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang denga tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum penarikan pajak secara yuridis *dapat dipaksakan* atau ditagih secara paksa oleh aparat yang berwenang. Apabila utang pajak tidak dibayar oleh wajib pajak (WP) dalam jangka waktu tertentu maka penagihan dapat dilakukan secara kekerasan seperti melalui surat paksa, sita, lelang, dan sandera. Menurut Guritno Mangkoesoebroto dalam (Azwar,2008 :36) memberikan definisi pajak sebagai berikut Pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada undang-undang pungutannya

dapat dipaksakan kepada subjek pajak untuk itu tidak ada balas jasa yang langsung ditunjukkan penggunaannya.

1. Berfungsi sebagai *Budgeter*, karena pajak sebagai salah satu sumber penerimaan terpenting dari pemerintah membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
2. Berfungsi sebagai *Regulatory*, karena pajak berfungsi sebagai alat pengatur kegiatan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 yang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 Ayat 49, pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek atau subjek pajak atau retribusi, penentuan besar pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

#### 2.4. Pemerintahan Daerah

Mengingat wilayah Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau, dari sabang sampai merauke, yang terdiri dari kota besar dan kota-kecil, dengan rentang geografis yang sangat luas dan beraneka ragamnya sosial budaya. Maka undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai suatu konstitusi berkeinginan untuk mengatur pemerintah daerah, hal ini sebagaimana dituangkan dalam ketentuan pasal 18 UUD 1945 yang sebelumnya diamandemen menegaskan sebagai berikut:



“pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam system pemerintahan Negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa”.

Berdasarkan pasal 18 undang-undang dasar 1945 tersebut yang menetapkan bahwa bentuk dan susunan pemerintahan ditetapkan berdasarkan undang-undang sistem pemerintahan daerah, maka dalam penyelenggaraan sistem pemerintah daerah sejak proklamasi kemerdekaan sampai dengan era reformasi, sudah berapa kali pemerintah membentuk undang-undang tentang pemerintahan daerah, dimana setiap perubahan-perubahan terhadap ketentuan pemerintahan daerah tersebut, masing-masing saling menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi serta tuntutan masyarakat, sehingga lahir lah undang-undang nomor 22 tahun 1999 dan digantikan dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang memberikan hak otonom bagi masing-masing daerah untuk mengurus dan mengelola rumah tangga daerahnya sesuai dengan aspirasi masyarakat sendiri.

Sesuai dengan ketentuan amandemen undang-undang dasar 1945 tersebut diatas, kemudian manan (2001: 59) mengemukakan bahwa sistem pemerintahan rumah tangga daerah tersebut adalah:

1. Harus menjamin ke ikut sertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah baik dalam bidang pengaturan maupun dalam bidang pengurusan rumah tangga daerah.
2. Pada dasarnya urusan rumah tangga daerah bersifat asli, bukan sesuatu yang diserahkan oleh satuan pemerintahan tingkat lebih atas, jadi

pemerintahan daerahlah yang berinisiatif dan mengembangkan urusannya sendiri, bukan menunggu penyerahan dari pemerintah pusat atau pemerintah atasnya.

3. Sebagai konsekuensinya dari butir (b) di atas, maka sistem rumah tangga harus memberi tempat bagi prakarsa dan inisiatif sendiri dari daerah-daerah untuk mengatur dan mengurus berbagai kepentingan atau hal-hal yang dianggap penting bagi daerah-daerah mereka.
4. Rakyat diberi kebebasan untuk mengatur dan mengurus segala kepentingan mereka dengan jumlah urusan yang diserahkan pusat tapi harus sejalan dengan kepentingan masyarakat daerah sendiri.
5. Urusan rumah tangga daerah dapat berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lain, sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat.
6. Sistem rumah tangga daerah harus mencerminkan kekuasaan antara pusat dan daerah dalam hubungan desentralistik, setiap bentuk campuran pusat atas urusan rumah tangga daerah, tidak boleh mengurangi kemandirian daerah.

Sistem rumah tangga daerah harus ditunjukan terutama untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Dengan kata lain urusan rumah tangga daerah harus terutama ada bidang pelayanan kepentingan umum, ada tempat bagi pemerintah pusat untuk mempengaruhi rumah tangga daerah demi menjamin pemerataan keadilan dan kesejahteraan sosial dan penentuan isi rumah tangga daerah yang baru. Hal ini terkait dengan fungsi pemerataan yang bisa dilakukan

oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak mampu melakukan fungsi ini karena ruang lingkupnya yang hanya sebatas daerah jurisdiksinya.

Pemerintah daerah adalah sub sistem dalam sistem pemerintahan Negara. Oleh karena itu tujuan yang diemban pemerintah daerah adalah sama dengan tujuan yang diemban oleh pemerintah pusat dalam mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Amandemen undang-undang dasar 1945.

Sistem rumah tangga daerah harus ditunjukan terutama untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Dengan kata lain urusan rumah tangga daerah harus terutama ada bidang pelayanan kepentingan umum, ada tempat bagi pemerintah pusat untuk mempengaruhi rumah tangga daerah demi menjamin pemerataan keadilan dan kesejahteraan sosial dan penentuan isi rumah tangga daerah yang baru. Hal ini terkait dengan fungsi pemerataan yang bisa dilakukan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak mampu melakukan fungsi ini karena ruang lingkupnya yang hanya sebatas daerah jurisdiksinya.

Pada saat ini, pemerintah kota maupun desa telah memiliki wewenang untuk mengatur wilayahnya masing-masing. Hal ini diatur pada undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang terlahir untuk kepentingan masyarakat.

Salah satu bentuk pelayanan pemerintah dalam pelayanan kepada masyarakat adalah dengan diterbitkan perda untuk memberikan pelayanan dalam penetapan izin mendirikan bangunan yang terdapat pada kabupaten Rokan Hilir.

Selanjutnya dapat dilihat bahwa control secara harfiah dapat diartikan “pengawasan”. Effendy (2003:116) mengemukakan bahwa control adalah seluruh kegiatan mulai dari penelitian serta pengamatan yang teliti terhadap berjalannya rencana, dengan menggunakan rencana yang ada serta standar yang ditentukan, serta memberikan dan mengoreksi penyimpangan rencana dan standar, serta penilaian terhadap hasil pekerjaan dibandingkan dengan masukan yang ada atau dikeluarkan yang dihasilkan.

Jika diteliti menurut prosesnya, maka control itu terdiri dari kegiatan :

- a. Menentukan standar adalah ketentuan standar yang menjadi ukuran dan pola untuk pelaksanaan pekerjaan atau produk yang dihasilkan. Standar harus jelas, logis, wajar, tidak muluk, objektif.
- b. Pengukuran dan pengamatan pekerjaan yang berjalan adalah pelaksanaan kegiatan rencana yang dilakukan dengan membuat catatan sebagai laporan mengenai perkembangan proses manajemen.
- c. Penafsiran dan perbandingan hasil yang ada dengan standar yang diminta adalah perbandingan penilaian hasil pekerjaan dibandingkan penilaian hasil pekerjaan dibandingkan antara hasil yang sebenarnya dengan standar, tetapi juga dinilai dengan keadaan seberapa jauh penyimpangan yang telah terjadi dari standard dan rencana serta sebab-sebab penyimpangan.
- d. Tindakan korektif terhadap penyimpangan adalah langkah tindakan yang bertujuan untuk mencari kesalahan, juga memberikan bagaimana

cara memperbaikinya dan menerangkan apa yang menyebabkan terjadinya penyimpangan.

- e. Perbandingan hasil akhir dengan masukan yang telah terjadi adalah proses pelaksanaan suatu rencana diberikan pengukuran terhadap hasil yang didapat dengan hasil yang telah diberikan berdasarkan standard dan rencana yang telah ditentukan. (effendi, 2003 : 116)

Luther gulick dan L. Urwick dalam ndraha (2003 : 12) mengemukakan bahwa Control merupakan suatu proses. Proses tersebut berlangsung dibawah empat prinsip control yang juga prinsip organisasi. Ke empat prinsip itu adalah:

1. Koordinasi sebagai hubungan timbal balik semua factor didalam suatu situasi.
2. Koordinasi dengan kontak langsung antar manusia yang berkepentingan.
3. Koordinasi pada tahap awal setiap kegiatan.
4. Koordinasi sebagai sebuah proses yang berjalan terus menerus.

Proses pengawasan terdiri dari tindakan (langkah pokok) tertentu yang bersifat fundamental bagi semua pengawasan managerial. Langkah-langkah pokok ini menurut George.R. Terry dalam sarwoto (2002 :100) meliputi :

- a. Penentuan ukuran atau pedoman baku (standar)
- b. Penilaian atau pengukuran terhadap pekerjaan yang sudah/seyatnya dikerjakan.

- c. Perbandingan antara pelaksanaan pekerjaan dengan ukuran atau pedoman buku yang telah ditetapkan untuk mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.
- d. Perbaikan atau pembetulan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, sehingga pekerjaan tadi sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Sedangkan teknik pengawasan menurut sarwoto (2001 :103) menjelaskan ada dua yaitu:

- 1. Pengawasan langsung dapat berbentuk inspeksi langsung observasi, dan laporan ditempat.
- 2. Pengawasan tidak langsung dapat berbentuk laporan tertulis dan lisan.

Sementara itu dapat dilihat keputusan Bupati Rokan Hilir nomor :27 tahun 2007 tentang penertiban bangunan dan bangunan sarang burung wallet di kecamatan bangko kabupaten rokan hilir menjelaskan bahwa tugas tim penertiban bangunan dan bangunan sarang burung wallet di kecamatan bangko kabupaten rokan hilir adalah:

- a. Mendapatkan informasi yang berkaitan dengan IMB dan izin lainnya beserta pajak maupun retribusi yang berkaitan dengan usahanya.
- b. Mengambil tindakan seperlunya apabila terjadi penyimpangan izin pajak dan retribusi yang tidak sesuai dengan peruntukan usahanya maupun yang tanpa izin.
- c. Menyampaikan laporan secara berkala dan berkesinambungan.

## 2.5. Pengertian Peranan

Berdasarkan referensi yang ada belum ada kesatuan persepsi tentang arti kata peranan, karena itu dalam rangka menyatukan persepsi, maka berikut ini akan di sajikan beberapa definisi tentang kata peranan menurut Soerjono Soekanto ( 2005 : 243 ) Peranan adalah pertama , merupakan aspek dinamis kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya dan menjalankan suatu peranan. Kedua, peran adalah karena ia mengatur perilaku seseorang dan peranan menyebabkan seseorang pada batas tertentu dapat melakukan perbuatan –perbuatan orang lain. Ketiga, peranan adalah diatur norma-norma yang berlaku misalnya norma kesopanan menghendaki agar seorang laki-laki bila berjalan bersama seorang wanita harus disebelah luar.

Menurut ( Veitzal Rivai, 2004: 148 ) peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu. Selanjutnya menurut ( Muhammad Ali, 2000 : 148 ) peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian yang memegang pimpinan yang terutama yang dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Peranan Muhammad Ali tersebut mengandung maksud yaitu bahwa dengan adanya posisi tertentu maka seseorang yang lebih memiliki kepentingan dalam kehidupan sosial akan lebih besar peran atau tanggung jawabnya dalam menyelesaikan permasalahan – permasalahannya yang dihadapi oleh masyarakat yang dipimpinnya.

Menurut Miftha Thoha ( 2005: 10 ) peranan dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku yang timbul karena suatu jabatan tertentu.

Sedangkan menurut kamus bahasa Indonesia dikatakan bahwa yang dimaksud dengan peranan adalah suatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal peristiwa.

## **2.6. Peran kelembagaan/ institusi ( Bapedalda )**

Pemerintah merupakan sektor publik yang memberikan pelayanan bagi masyarakat menunjukkan adanya institusi yang bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan penertiban sarang walet. Salah satu instansi atau badan pemerintah yang berperanan dalam penertiban sarang burung walet yang ada di Kabupaten Rokan Hilir adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah yang disingkat dengan (BAPEDALDA ) yang berfungsi untuk pelaksanaan pelestarian sarang burung walet, sebab burung walet merupakan satwa liar yang dapat dimanfaatkan secara lestari sebesar- besarnya untuk kesejahteraan rakyat dan BAPEDALDA juga berperan menjalani Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2007 Tentang pelaksanaan Penertiban penangkaran Sarang Burung Walet yang ada di Kabupaten Rokan Hilir khususnya Kecamatan Bangko. Didalam peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2007 pada Pasal 11 menjelaskan tentang :

- (1) . Pemantauan terhadap bunyi pita kaset burung walet
- (2) . Kegiatan pengusaha dalam penertiban penangkaran sarang burung walet
- (3) . Melakukan tindakan persuasif pengusaha dilapangan
- (4) . Pelaporan pengusaha walet



## 2.7. Pengertian Lingkungan

Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya. Baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Kita bernapas memerlukan udara dari lingkungan sekitar. Kita makan, minum, menjaga kesehatan, semuanya memerlukan lingkungan. Menurut Soeriatmadja ( 2005 : 15 ) Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik langsung maupun tidak langsung. Lingkungan bisa dibedakan menjadi lingkungan biotik dan abiotik. Jika kalian berada di sekolah, lingkungan biotiknya berupa teman-teman sekolah, bapak ibu guru serta karyawan, dan semua orang yang ada di sekolah, juga berbagai jenis tumbuhan yang ada di kebun sekolah serta hewan-hewan yang ada di sekitarnya. Adapun lingkungan abiotik berupa udara, meja kursi, papan tulis, gedung sekolah, dan berbagai macam benda mati yang ada di sekitar. Seringkali lingkungan yang terdiri dari sesama manusia disebut juga sebagai lingkungan sosial. Lingkungan sosial inilah yang membentuk sistem pergaulan yang besar peranannya dalam membentuk kepribadian seseorang.

Menurut Soemarno ( 2007 : 45 ) Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Selanjutnya menurut Muhtadi : A. Tumenggung ( 2003 : 32 ) Lingkungan adalah sekeliling tempat organisasi berorganisasi, termasuk udara, air, tanah, sumber daya alam, flora, fauna, manusia serta hubungan didalamnya. Pengertian lingkungan yang lain, merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup lain.

Ruang, merupakan suatu tempat berbagai komponen lingkungan hidup menempati dan melakukan proses, sehingga antara ruang dan komponen lingkungan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Lingkungan hidup merupakan ekologi terapan dengan tujuan agar manusia dapat menerapkan prinsip dan konsep pokok ekologi dalam lingkungan hidup. Manusia merupakan makhluk yang paling dominan terhadap ekosistem di bumi. Lingkungan dalam paradigma keperawatan difokuskan pada lingkungan masyarakat yaitu lingkungan fisik, psikologi, sosial, budaya dan spiritual.

### **2.8. Konsep Operasional**

Untuk membangun kesamaan persepsi dan pengertian serta menghindari salah pengertian terhadap istilah yang digunakan pada judul penelitian ini, maka akan dioperasionalkan beberapa konsep yang bersifat membatasi diantaranya:

1. Implementasi adalah suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam melaksanakan Peraturan Bupati No. 09 tahun 2007 tentang izin pengelolaan walet.
2. Implementasi adalah tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Dimana implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan dan program-program yang dinilai dari:

- a. Pemantauan terhadap bunyi pita kaset burung walet adalah kegiatan tim pemantau dan penertiban penangkaran burung walet Kabupaten Rokan Hilir dalam menetapkan aturan dilarang membunyikan suara pita kaset burung walet kecuali pada pukul 16.00 s/d 1900 WIB, membunyikan suara pita kaset burung walet melebihi 55 desibel (db).
- b. Kegiatan pengusaha dalam penertiban penangkaran burung walet di Kabupaten Rokan Hilir adalah kegiatan pengusaha dalam penertiban penangkarang burung walet Kabupaten Rokan Hilir dalam menertibkan penangkarang burung walet disekitar perkotaan, pendidikan, perumahan penduduk, rumah ibadah, dan tempat pelayanan kesehatan masyarakat.
- c. Melakukan tindakan persuasif pengusaha dilapangan adalah kegiatan tim pemantauan dan penertiban penangkaran burung walet Kabupaten Rokan Hilir dalam memberikan tindakan kepada pengusaha yang melanggar aturan yang ditetapkan dengan langkah memberikan peringatan secara tertulis, pencabutan izin dan ketentuan pidana.
- d. Pelaporan pengusaha walet adalah kegiatan pengusaha terhadap pelaporan yang dilihat dari perkembangan jumlah pengusaha burung walet, tingkatan pelanggaran terhadap penangkaran burung walet

## 2.9. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan tujuan penelitian serta dihubungkan dengan teori-teori yang relevan maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut “diduga peranan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dalam menertibkan penangkaran sarang burung walet belum berjalan dengan baik disebabkan kualitas kerja tim pemantau belum berjalan dengan optimal”.

## 2.10. Variabel Penelitian

Adapun variabel dalam penelitian ini adalah Tahapan Implementasi Peraturan Bupati No 27 Tahun 2007 Tentang pelaksanaan Penertiban Bangunan dan Bangunan sarang burung walet

Dengan Indikator :

1. Pemantauan terhadap bunyi pita kaset burung walet
  - Dilarang membunyikan suara pita kaset burung walet kecuali pada pukul 16.00 s/d 19.00 Wib
  - Dilarang membunyikan suara pita kaset melebihi 55 desibel (db)
2. Kegiatan pengusaha dalam penertiban penangkaran burung walet
  - Menertibkan penangkaran burung walet disekitar perkotaan
  - Menertibkan penangkaran burung walet disekitar pendidikan
  - Menertibkan penangkaran burung walet disekitar perumahan penduduk
  - Menertibkan penangkaran burung walet disekitar rumah ibadah

- Menertibkan penangkaran burung walet disekitar tempat pelayanan kesehatan masyarakat dengan jarak 500 meter
3. Melakukan tindakan persuasif pengusaha di lapangan
- Peringatan secara tertulis
  - Pencabutan izin
  - Ketentuan pidana
4. Pelaporan pengusaha walet
- Perkembangan jumlah pengusaha walet
  - Tingkat pelanggaran terhadap penangkaran burung walet

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1. Lokasi Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang terjadi, maka penelitian ini dilakukan di Kabupaten Rokan Hilir, lokasi penelitian adalah kantor Bapeldalda Kabupaten Rokan Hilir, pada Tahun 2011.

#### **3.2. Jenis dan Sumber Data**

1. Data primer, yaitu data utama yang diperoleh langsung dilapangan dari pihak pertama dalam hal ini responden terpilih sebagai sampel, yakni peranan badan pengendalian dampak lingkungan daerah (Bapeldalda) Kabupaten Rokan Hilir dalam penertiban penangkaran burung wallet (Studi di Kecamatan Bangko)
2. Data sekunder, merupakan data pelengkap yang diperoleh dari pihak kedua sehubungan dengan pembahasan ini, antara lain:
  - a. Gambaran umum Kabupaten Rokan Hilir
  - b. Tugas pokok, Kedudukan dan fungsi Kantor Bapeldalda Kabupaten Rokan Hilir
  - c. Susunan Organisasi dan Uraian Tugas
  - d. Keadaan pegawai dan fasilitas kerja pada Kantor Bapeldalda
  - e. Struktur Organisasi Kantor Bapeldalda Kabupaten Rokan Hilir

### 3.3. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi, adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap obyek penelitian lapangan sehubungan dengan system perizinan walet yang dilakukan oleh pengusaha walet kepada pemerintah melalui Bapeldalda Kabupaten Rokan hilir.
2. Wawancara, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan melalui dialog langsung secara lisan dan terpimpin terhadap sebagian responden yang dianggap perlu dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disediakan yaitu dilakukannya wawancara dengan Kepala Bapeldalda terhadap pelaksanaan penertiban penangkaran burung walet di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.
3. Angket/kuesioner yaitu suatu aktifitas pengumpulan data dengan menyebarkan angket berupa suatu daftar pertanyaan tertulis kepada responden terpilih untuk diisi sesuai dengan alternatif jawaban yang telah disediakan diberikan kepada pengusaha walet untuk dapat dikumpulkan informasi terhadap jumlah pengusaha walet yang memiliki izin dan belum memiliki izin dalam menilai pelaksanaan penertiban penangkaran burung walet di Kccamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.

### **3.4. Populasi dan Sampel**

#### **3.4.1. Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas, objek subyek yang mempunyai kualitas dan kerakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulan, Populasi dalam penelitian ini adalah kepala kantor,tim penertiban penangkaran burung walet dan pengusaha burung walet yang ada di Kabupaten Rokan Hilir yang berjumlah 316 pengusaha/ responden.

#### **3.4.2. Sampel**

Proses penarikan sampel dalam penelitian ini beritik tolak pada jumlah populasi yang relative cukup banyak, maka untuk memerlukan data yang dibutuhkan, diambil beberapa sampel dari setiap unsur populasi yang dirasa memungkinkan untuk mewakili setiap kelompok. Teknik penarikan sampel yang digunakan yaitu *Random sampling* yaitu penarikan sampel diambil secara acak. Suharsimi Arikunto,( 2006 : 134 ) apabila subjeknya kurang dari 100,lebih baik diambil semuanya sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Tetapi jika jumlah subjeknya besar, dapat diambil antara 10 -15 % atau 20 - 25 %. Untuk lebih jelasnya dibawah ini dapat dilihat jumlah populasi dan sampel yang dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:



**Tabel III.4. Keadaan Populasi Dan Sampel Penelitian**

<b>NO</b>	<b>Sub populasi</b>	<b>Populasi</b>	<b>Sampel</b>	<b>%</b>
1	Kepala Bapeldalda Kab. Rohil	1	1	100
2	Kabid Penertiban Bapeldalda	1	1	100
3	Tim penertiban penangkaran burung walet	12	12	100
4	Pengusaha walet yang ada di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir	316	63	10
<b>Jumlah</b>		<b>330</b>	<b>45</b>	<b>-</b>

**Sumber : Data Olahan 2011**

### **3.5. Analisis Data**

Metode yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah dengan metode deskriptif, dimana setelah data yang diperlukan diperoleh, lalu data tersebut dikelompokkan dan diuraikan sesuai dengan jenisnya dan dianalisa dengan menggunakan analisis kualitatif, kemudian disajikan dalam bentuk Tabel yang dilengkapi dengan penjelasan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, PT. Rineka Cipta, Jakarta. 2006.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT . Gramedia Pustaka Utama Jakarta. 2003.
- Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Rajawali Pers, Jakarta. 2008.
- Effendy, *Pengawasan organisasi pemerintah*, PT Kineka Cipta, Jakarta. 2003.
- Koryati, Nyimas Dwi, dkk. 2005, *Kebijakan Dan Manajemen Pembangunan Wilayah*, YPAFI, Yogyakarta.
- Lateif, Abdul, *Hukum dan Peraturan Kebijakan Pada Pemerintah Daerah*, UII-Press, Yogyakarta. 2005.
- Manan, *Sistem pemerintahan Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta. 2001.
- N. Dunn, William, 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gajah Mada University, Yogyakarta.
- Nugroho, Riant, 2004, *Kebijakan Publik ( Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan*.
- Nogi S, Hessel, 2003, " *Kebijakan Publik Untuk Pemimpin Berwawasan Internasional* " . Yogyakarta . Penerbit fahillah.
- Thoha, Miftah, *Kepemimpinan dan Manajemen Suatu Pendekatan Prilaku*, Sinar Baru, Bandung 2005
- Rivai, Veitzal, *Kepemimpinan*, Grafindo persada, Jakarta, 2004
- Rasyid., Ryaas, 2000. *Pemerintah Yang Amanah*, Yakarta. Bina Rena Pariwara
- ..... 2001 " *Fungsi-Fungsi Pemerintahan* ", Jakarta. Badan Pendidikan dan Pelatihan Depdagri
- ..... 2002 " *Makna Pemerintahan (Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan)* " Jakarta. PT . Mutiara Sumber Widya
- Singarimbun, Masri, Sofyan Efendi, 2002, *Method Penelitian Survei*, LP3S. Yogyakarta.

Sarwoto, 2002, *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*, Ghalia Indonesia Jakarta.

Syaukani, 2002, *Otonomi daerah*, Alfabeta. Bandung

Soekanto, Soejono. *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, Edisi Baru, cet.38.PT Raja Grafindo Perada, Jakarta, 2005

Soeriatmadja, R.E. 2005. *Ilmu Lingkungan*. ITB. Bandung.

Tumenggung, A. Muhtadi. 2003. *Pengantar Ilmu Teknik Lingkungan*, Djambatan. Jakarta.

Widjaja, Haw, 2001, *Pemerintahan Desa / Marga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah ( Suatu Telah Administrasi Negara )*. Jakarta. PT. Rajagrafindo Persada.

..... 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta. PT. Rajagrafindo Persada.

Winarno, Budi, 2007, *Kebijakan Publik ( Tiori dan Proses )*. PT. Buku kita. Jakarta.

Undang-Undang Dasar 1945, Hasil Amandemen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang "*Pemerintahan Daerah . Dirjen PUOD*" . Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang "*Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah*" , Dirjen PUOD Jakarta.

Peraturan Bupati Rokan Hilir No. 9 Tahun 2007 *Tentang Izin Pengelolaan Sarang Burung Walet*

Peraturan Bupati Rokan Hilir No.27 Tahun 2007 Tentang Penertiban Bangunan Dan Bangunan Sarang Burung Walet Di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir.